

TAJUK RENCANA

Judi Online di Lingkup Penegak Hukum

HINGGA hari ini diskursus tentang model pemberantasan judi online di Indonesia belum usai. Meski pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, namun kiprahnya belum signifikan. Hampir setiap hari kita disuguhi pemberitaan tentang pengungkapan kasus judi online, berikut proses hukumnya, namun seiring dengan itu, kasusnya bukan berkurang tapi malah terus merebak.

Tentu ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Apalagi, hampir semua sektor, termasuk aparat penegak hukum, tidak steril dari judi online, baik itu sebagai pemain, bandar, maupun beking. Untuk hal yang disebut terakhir ini nampaknya belum disentuh Satgas. Bahkan, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam sebuah wawancara media keceposan menyebutkan sejumlah 'aktor besar' judi online yang belum tersentuh hukum. Meski Budi Arie tidak menyebut nama, namun paling tidak orangnya sudah teridentifikasi.

Publik tentu mengerti apa yang disampaikan Budi Arie sebagai hal yang sangat serius. Lebih serius lagi karena muncul kegagapan aparat penegak hukum untuk menangkap mereka. Ironisnya, Budi Arie adalah anggota Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Presiden Jokowi. Ia menempati posisi di bidang pencegahan yang tugasnya antara lain memblokir situs-situs judi online yang berkecambah di dunia maya.

Budi Arie berkilah bahwa tugas untuk menangkap pelaku, bandar maupun beking judi online berada di jajaran aparat penegak hukum. Ia ingin mengatakan dirinya tidak berhak untuk menangkap maupun

memproses hukum mereka. Tentu masyarakat sudah paham bahwa Kementerian Kominfo memang bukan lembaga penegak hukum yang punya kewenangan memproses hukum pelaku judi online. Tapi, setidaknya, kementerian ini bisa memberi informasi kepada aparat penegak hukum untuk memproses lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat judi online.

Belakangan, sejumlah pegawai KPK juga terdeteksi terlibat judi online. Hal ini diakui sendiri oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Tanpa menyebut jumlah, ia membenarkan sejumlah pegawai KPK terlibat judi online sebagaimana penelusuran Inspektorat (KR 10/7). Tentu ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Setelah terlibat kasus pungli di Rutan KPK, kini giliran terlibat aktivitas ilegal judi online. Lantas, apa yang bisa diharapkan dari pegawai semacam ini?

Bisakah mereka hanya kita sebut sebagai oknum? Kalau jumlahnya hanya satu atau dua orang, kita setuju menyebutnya sebagai oknum. Namun kalau jumlahnya lebih dari lima orang, misalnya, tentu bukan lagi oknum, namun sudah menyangkut sistem. Inilah yang mestinya harus dibenahi. Pimpinan KPK, terutama divisi pencegahan mestinya proaktif untuk menciptakan sistem yang tidak memungkinkan atau memproteksi agar pegawai KPK tidak bisa terlibat aktivitas ilegal, baik itu pungli maupun judi online.

Kita yakin, bisa sistem pengawasan internal ketat, antarpegawai saling mengawasi, aktivitas ilegal, baik pungli maupun judi online dapat diberantas atau paling tidak dieliminasi. Ini butuh komitmen atau political will dari pimpinan KPK. □-d

Nasib Guru (Tua)

Lilis Ummi Fa'iezah

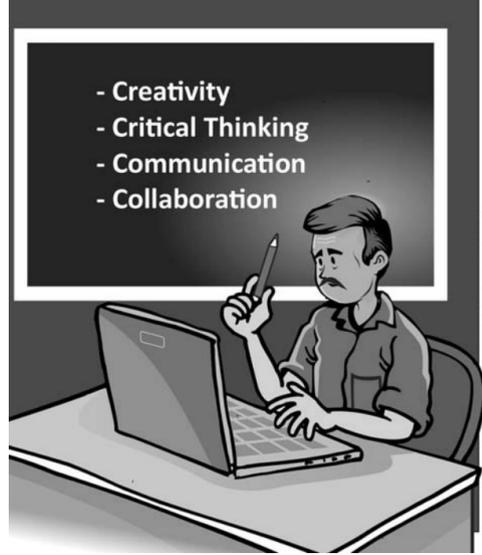
pu berpikir kreatif. Dengan kualifikasi yang demikian tanpa mengecilkan peran para pendidik senior, bisa disimpulkan bahwa pendidik yang mampu menguasai keterampilan kekinian adalah pendidik muda masa kini.

Lembaga pendidikan saat ini tentu tidak hanya diisi oleh kamu profesio-

nerasi muda saat ini. Ada hal-hal yang harus dikuasai dan tidak bisa disam-paikan dengan menggunakan teknologi seperti interaksi langsung di kelas, penanaman karakter, contoh teladan dan ikatan emosional guru dan siswa. Sebenarnya, belajar teknologi bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi juga seperti internet, namun memberikan metode yang inovatif dan kreatif sehingga dapat menarik perhatian dan antusias siswa pada materi yang sedang diajarkan hanya bisa dilakukan langsung oleh guru termasuk guru senior.

Jadi, guru senior tidak perlu berkecil hati dan merasa tersingkirkan hanya karena kurang menguasai teknologi. Justru guru senior sangat diperlukan dalam era teknologi ini termasuk membendung efek buruk dari teknologi pada generasi muda dengan menanamkan karakter yang baik. Hanya saja guru senior tetap dituntut untuk meningkatkan kualifikasinya dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Guru harus tetap mengikuti pelatihan peningkatan kualitas guru atau memperbarui kemampuannya dengan belajar mandiri. Belajar menguasai teknologi juga perlu bagi guru senior sesuai dengan kemampuannya agar tidak terlalu jauh dari perkembangan zaman. Institusi pendidikan juga perlu memberikan bantuan pada guru senior berupa pendampingan dari guru muda pada guru senior agar siswa memahami teknologi dan paradigma kebaruan dari guru muda sekaligus terjaga karekturnya dari guru senior. □-d

**) Lilis Ummi Fa'iezah MA, Guru MTsN 6 Sleman, alumni Curtin University of Technology, Australia.*



KR-JOKO SANTOSO

nal muda saja, namun juga para pendidik senior yang mengalami kegagapan dalam urusan teknologi dan perubahan paradigma pendidikan. Tentu tidak mungkin mengganti semua pendidik senior dengan para profesional muda karena akan menimbulkan permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Tidak terlalu efektif pula untuk meningkatkan penguasaan teknologi para guru senior agar sejajar dengan para profesional muda.

Perlu diketahui bahwa untuk menjawab tantangan Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 adalah kecakapan abad-21 yaitu 4C (Creativity, Critical Thinking, Communication dan Collaboration). Sedang untuk mendukung kecakapan tersebut, siswa perlu memiliki kompetensi literasi seperti literasi numerasi, sains, informasi dan bahasa serta yang lainnya. Dengan keadaan ini, muncul pertanyaan tentang peran guru senior dalam era kekinian. Tentu disepakati bahwa penguasaan teknologi bukan

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi.

Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijnarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ● Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karanglemes, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Revitalisasi Tamansiswa Taman Negara

OPINI Bapak Darmanto yang berjudul 'Revitalisasi Tamansiswa untuk Masa Depan' dan Ki Bambang Widodo yang berjudul 'Tantangan dan Harapan Tamansiswa Menapaki Abad Kedua' yang di muat di SKH **KEDAULATAN RAKYAT** tanggal 3 Juli 2024 mengekspresikan keprihatinan, tentu menjadi keprihatinan sekaligus daya ungkit bagi kita anak bangsa. Sharing opini ini merupakan keprihatinan untuk mengungkit reaktualisasi budaya pendidikan Tamansiswa menjadi Taman Negara dan Bangsa.

Refleksi Masa Lalu

Jalan pikiran Ki Hadjar yang mengkampanyekan Budaya Pendidikan "Among-Ing Ngarsa Sung Tulada-Ing Madya Mangun Karsa-Ing Wingking Tut Wuri Handayani", mengkondisikan lingkungan pembelajaran sekolah sekaligus suasana tumbuh kembang bebas yang menyenangkan ibaratnya taman; visioner lintas zaman. Belanda pun mengakui sebagai budaya Pendidikan Nasionalisme tingkat tinggi sehingga bermaksud meminggirkan. Sedang Sila Ketuhanan YME Pancasila, ajaran Ki Hadjar Dewantara menginspirasi dan memotivasi umat ciptaan Allah untuk bersama-sama menjalankan tugas Ilahi mengelola Taman Dunia; juga sejalan dengan Pitutur Luhur "Manunggaling Kawula Gusti, Eling Sangkan Paraning Dumadi-Memayu Hayuning Bawana" yang diakui UNESCO. Sejarah membuktikan bahwa ajaran Ki Hadjar bukan saja menjadi milik Tamansiswa dan Sarjana Wiyata, namun telah menjadi milik seluruh bangsa yang dikuatkan dengan ketetapan negara tanggal lahir Ki Hadjar sebagai Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang juga menjadi Menteri Pendidikan. Lintas generasi anak bangsa tentu merasakan pembentukan diri ajaran Ki Hadjar sejalan dengan butir-butir Pancasila. Memprihatinkan memang kalau keduanya terus meredup.

Reaktualisasinya

Pendidikan apapun berlangsung tanpa henti berkesinambungan formal

JB Soebroto

maupun informal, *learning by doing* sampai akhir hayat. Dalam lingkup berbangsa bernegara, relevanlah kalau ajaran Ki Hadjar kita aktualisasikan sebagai Taman Indonesia. Para Pemimpin apalagi pemimpin negara dan aparatnya berusaha menjadi teladan (*Ing Ngarsa Sung Tulada*), di tengah masyarakat menggerakkan semangat (*Ing Madya Mangun Karsa*), dari belakang mendorong pemberdayaan bernilai guna (*Tut Wuri Handayani*). Ketiga tugas mulia ini terintegrasi; untuk mengelola Indonesia bagaikan sebuah taman yang memang indah rekreatif menyenangkan dan penuh sumber daya. Kalau secara spiritual religius dikenal penyakit jasmang, jiwa dan rohani; maka pengkhianatan terhadap nilai-nilai butir Pancasila dan ajaran Ki Hadjar adalah dosa atau penyakit jiwa, yang akan menjadi penyakit atau dosa rohani bila tidak ada keinsafan atau kesadaran untuk mengakuinya dan bertobat untuk berubah kembali baik benar. Penyakit atau dosa jiwa saat ini adalah ajaran jalan pikiran solidaritas Nasionalisme yang menyempit menjadi solidaritas golongan, kroni bahkan keluarga; kekuasaan untuk kekayaan lupa diri terhadap keselamatan roh. Padahal diyakini usaha spiritual universal mulia *'husnul khotimah, sakaratul maut, inaa lillahi wa inaaa ilaihi rojiun'*; saat kematian (lepasnya roh dari raga) yang tidak terduga, roh akan langsung diadili; otomatis menuju ke neraka, surga atau prasurga, sejalan dengan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai anugerah Allah mendasar.

Akhirnya, diharapkan dalam periode transisi Presiden dan Pilkada serentak ini kembali di-reaktualisasikan nilai Pancasila dan budaya pendidikan

Ki Hadjar Dewantara. Presiden Jokowi dan Prabowo bersama menteri, calon menteri, kepala daerah dan penggantinya memberi teladan reaktualisasi Pancasila dan ajaran Ki Hadjar, berorientasi figur teladan, menggerakkan semangat kerja ibadah dan mendorong pembangunan menuju kesejahteraan di dunia akhirat; tidak sekadar popularitas elektabilitas karbitan yang memporak-porandakan budaya pendidikan Ki Hadjar. Menteri Pendidikan atau stafnya dipertimbangkan dari Tokoh Tamansiswa. Salam nasional ide Ki Hadjar, 'Salam Bahagia' direaktualisasi menjadi 'Salam Ketuhanan YME dalam Nasionalisme' penutup 'Salam Berkah Kerja Ibadah Untuk Kesejahteraan Kita Semua'. *Last but not least* "JAS-MERAH", jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan bahkan mengganti sejarah masa lalu yang sudah jelas berguna dan bermanfaat, tidak hanya Pancasila dan ajaran Ki Hadjar, Bhineka Tunggal Ika, UUDi45, bahkan undang-undang dan hukum yang telah disepakati. □-d

**) JB Soebroto, Dosen Agama Kedokteran, Motivator Inovasi Pendidikan di Yogyakarta.*

Pojok KR

DPR akhirnya bentuk Pansus Haji.
-- Jangan hanya untuk bargaining.

BSSN pastikan data Pilkada 2024 aman.

-- BSSN juga harus aman dari serangan siber.

Miris, pegawai KPK terlibat judi online.

-- Tak bisa jadi contoh.

Beraksi